

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah memaparkan mengenai diplomasi publik melalui BDF di era pandemi dapat berjalan. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan BDF di era pandemi telah menjalankan strategi diplomasi publiknya. BDF sebagai forum dialog terbesar mengenai demokrasi di kawasan Asia-Pasifik telah berperan aktif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan demokrasi. Membawa konsep *homegrown democracy* dengan metode dialog melalui *sharing experiences and best practices*, BDF memberi ruang untuk para pesertanya melakukan diskusi untuk menemukan cara terbaik dalam mendorong demokrasinya. Hasil dari diskusi tersebut dapat menjadi acuan dalam kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan demi kemajuan demokrasi.

Selain sebagai arena dialog, BDF juga memiliki peran strategis bagi diplomasi publik Indonesia. BDF merupakan perwujudan dari aset yang dimiliki Indonesia yakni sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Aset tersebut dikembangkan sebagai *soft power* dan diproyeksikan dalam penyelenggaraan BDF. Dengan menyelenggarakan BDF, Indonesia dapat menjalankan diplomasi publiknya untuk membentuk citra sebagai negara demokrasi yang juga mendorong pembangunan dan kemajuan demokrasi di dunia.

Di era pandemi, pelaksanaan BDF memiliki urgensi baik bagi Indonesia maupun bagi dunia, khususnya di tingkat kawasan Asia-Pasifik. Bagi Indonesia, BDF di era pandemi memiliki peran penting dalam pelaksanaan diplomasi publik. BDF menjadi solusi diplomasi publik Indonesia yang tetap harus berjalan meskipun terbatas pandemi. BDF juga merupakan pertemuan internasional pertama yang diselenggarakan Indonesia sejak pandemi. Bagi dunia, BDF memiliki peran sebagai ruang diskusi untuk mencari solusi terkait pandemi yang sangat mempengaruhi demokrasi.

Penelitian ini berargumen bahwa pelaksanaan BDF di era pandemi telah menjalankan metode *new public diplomacy*. BDF telah memenuhi 6 kriteria dari *new public diplomacy* yang diformulasi oleh beberapa ahli dalam pelaksanaannya. Melalui pelaksanaannya di era pandemi, BDF juga telah melakukan transisi dalam digitalisasi diplomasi publik dengan melaksanakan forum ini secara *hybrid* dan memanfaatkan teknologi. Indonesia telah melakukan adaptasi menuju adopsi digital dalam transisi diplomasi publiknya melalui pelaksanaan BDF.

Meskipun begitu, terdapat alasan tertentu dari pelaksanaan BDF secara *hybrid*. Melalui pelaksanaan secara *hybrid*, Indonesia berupaya mendorong sektor-sektor lain yang dapat berpotensi mendapatkan efek samping yang positif. Sektor tersebut yakni ekonomi dan pariwisata. Kehadiran secara fisik dapat mendorong sektor tersebut terutama bagi Bali yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat mancanegara. Apalagi di era pandemi ketika sektor tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Meskipun begitu, fokus utama pelaksanaan BDF tetap pada substansinya mengenai demokrasi.

Melalui pelaksanaan BDF, Indonesia membentuk *nation-brand* negaranya sebagai negara demokrasi yang mengutamakan prinsip *homegrown democracy*. Setiap negara diperbolehkan untuk belajar mengenai demokrasi tanpa paksaan dan indikator tertentu untuk ikut serta dalam BDF. BDF meyakini bahwa membangun demokrasi harus tumbuh dari dalam dan setiap negara memiliki ciri khas demokrasinya masing-masing. Indonesia memanfaatkan pelaksanaan BDF sebagai agen untuk membentuk citra negaranya dan menjadikan audiens dari BDF sebagai sasaran dari *nation-brand* yang telah dibentuk.

Atas dasar tersebut, pelaksanaan BDF di era pandemi telah menjadi aset diplomasi publik Indonesia. Berdasarkan pelaksanaan BDF di era pandemi, Indonesia dapat mengembangkan inovasi yang telah ada dan mengubah tantangan yang dihadapi BDF menjadi sebuah peluang. Pelaksanaan BDF telah memberi manfaat baik bagi Indonesia khususnya dalam hal diplomasi publik. Bagi pesertanya, BDF telah memberikan media belajar yang tidak

membatasi dan menghakimi sehingga dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan mendorong demokrasi di tingkat dunia.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Dengan adanya penelitian ini, praktisi dapat menggunakannya sebagai acuan dalam membuat strategi dan inovasi kedepannya terkait pelaksanaan BDF, khususnya di masa pasca pandemi. Peneliti menyarankan praktisi, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara BDF untuk meninjau lebih jauh apakah pelaksanaan BDF sudah efektif sebagai ruang dialog juga sebagai alat diplomasi publik Indonesia. Dapat dibentuk semacam FGD dalam tiap sesinya dengan hasil seperti resolusi agar dapat menjadi sarana implementasi dari apa yang dipelajari dalam BDF dan interaksi yang terjadi dapat lebih dalam lagi.

Selain itu, perlu adanya penyesuaian kegiatan agar lebih banyak lagi agen-agen demokrasi yang terlibat. Dapat dilibatkan institusi yang berkaitan dengan pemilihan umum seperti partai politik, komisi pemilihan umum, Bawaslu, maupun agen politik lainnya dari berbagai negara. Dapat dibuat ruang ruang dialog seperti BCSMF dan BDSC sebagai wadah belajar bagi institusi terkait. Hal ini dilakukan untuk membuka wawasan dan masukan lebih jauh lagi mengenai demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Indonesia juga dapat menyediakan *capacity building* yang lebih banyak lagi dan menjangkau berbagai negara dunia yang membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan pengalamannya juga sebagai inisiator dari BDF yang telah mendorong pembangunan demokrasi di tingkat dunia.

Terakhir, Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai penyelenggara BDF dapat menyediakan bahan atau arsip yang teratur dan lengkap mengenai pelaksanaan BDF. Arsip tersebut dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya juga sebagai bahan

untuk melakukan evaluasi dari penyelenggaraan BDF sebelumnya. Dengan arsip yang lengkap, pelaksanaan BDF dapat terdokumentasi dengan baik. Perjalanan BDF dari tahun ke tahun menjadi sejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Jika diarsipkan dengan baik, sejarah tersebut dapat dipelajari dan memberikan manfaat bagi Indonesia.

6.2.2 Saran Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan konsep diplomasi publik yang dihadirkan melalui berbagai kegiatan oleh pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat menaruh fokus pada bagaimana konsep *new public diplomacy* dapat digunakan dalam berbagai alat diplomasi oleh pemerintah. Termasuk mengenai efektivitas dari penerapan teori tersebut pada alat diplomasi lain selain acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Indonesia. Misalnya pada acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh negara lain, maupun pada kegiatan yang diselenggarakan oleh aktor non-negara.

Selain itu, peneliti menyarankan untuk mengolah kembali bagaimana peran dan efek dari transisi digitalisasi dalam diplomasi publik yang belum dibahas lebih dalam pada penelitian ini. Mengingat teknologi yang terus berkembang, penelitian selanjutnya dapat berfokus pada media-media dan alat teknologi yang digunakan dalam melakukan diplomasi publik. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan teori lain mengenai transisi digitalisasi dalam diplomasi publik berikut dampaknya bagi negara maupun bagi aktor diplomasi itu sendiri.

Terakhir, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sumber referensi yang lebih variatif dan mendalam. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel. Dengan data yang valid dan kredibel, penelitian selanjutnya dapat menguji teori atau menghasilkan teori mengenai diplomasi publik maupun penerapan teknologi dalam diplomasi publik untuk membentuk *nation-brand* suatu negara.